

## Diskursus Islam Aceh<sup>1</sup>

*Saiful Akmal*

Aceh adalah entitas etnik yang unik. Selama dan sebelum penjajahan Belanda, dapat dikatakan Aceh adalah salah satu penganut ide khilafah Islamiah pan-Islamisme global, meskipun sebelum Kerajaan Aceh Darussalam (1496-1903 M), wilayah Aceh mencakup beberapa kerajaan kecil.

Analisis ini mampu dibuktikan dengan adanya relasi ekonomi, militer serta budaya antara Kerajaan Aceh Darussalam dan Kerajaan Turki Ottoman sebelum abad ke 20 M sebagai *center of gravity* kekuatan Islam dunia. Selanjutnya pula, Aceh mengambil peranan penting dalam upaya mengharmoniskan serta mengisi hubungan Islam dengan ide nasionalisme Indonesia semasa revolusi kemerdekaan.

Sampai kemudian, penggabungan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara di tahun 1950 ditenggarai menjadi satu sebab penting mengapa ide pemberontakan menyeruak. Unifikasi Aceh yang harus berinduk ke Medan terlepas dari segenap sumbangsih Aceh terhadap nasionalisme ke-Indonesia-an telah membuat hubungan Aceh, Islam dan Indonesia kembali menjauh. Akibatnya, ulama sebagai motor dinamisasi, mulai berpikir untuk mengIslamkan Aceh, kemudian Indonesia secara keseluruhan. Pada titik ini, ide Daud Bereueh bertemu dengan gagasan Kartosuwiryo dalam konsep DI-TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia).

Lantas akibat kegagalan pergerakan DI-TII, memaksa Aceh untuk kembali mengevaluasi perjuangannya mewujudkan keadilan sosial di *nanggroe endatu*. Celah ini memberi ruang, tempat, dan waktu bagi ide separatisme dalam bingkai nasionalisme Aceh (yang awalnya tak lepas dari landasan keislaman) untuk muncul ke permukaan dalam bentuk Gerakan Aceh Merdeka/GAM (Desember 1976). Nyatanya, perjuangan Islam kembali mengalami fase pengecilan ruang lingkup dari level nasional menjadi provinsial.

Kemudian, elite GAM yang menganggap bahwa memiliki legitimasi sejarah (langsung/tidak) dari DI-TII, masih mendukung dan memainkan wacana keislaman hingga dekade 90an. Plus, kebangkitan kedua GAM (akhir 1980an) juga mendapat suntikan dari interaksinya dengan dunia Islam internasional. Pertautan ini tampak relasinya dengan Libya, sebagai salah satu Negara mayoritas Muslim di dunia, yang menjadi tempat latihan militer dan Malaysia sebagai wilayah rekrutmen (minus Swedia sebagai pusat pemerintahan pengasingan) (Ross, 2003).

---

<sup>1</sup> Serambi Indonesia, 2/12/2011.

Seiring berubahnya peta politik global dan latar belakang sekuler elitinya, strategi GAM juga mengalami penyesuaian. Sehingga isu-isu lokal yang didengungkan GAM dengan bahasa humanis seperti ketidakadilan, HAM dan kesejahteraan semakin fasih menggantikan diskursus dan referensi keislaman seiring berakhirnya perang dingin, revolusi Balkan, serta momentum lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Salah satu tesis yang menyebabkan meluasnya dukungan kepada GAM adalah perlakuan dan penanganan salah Jakarta ke Aceh yang semakin menambah resistensi Aceh terhadap segala yang berbau Jakarta. McGibbon (2006) menambahkan bahwa, gaya pemberitaan media Indonesia juga berkontribusi memperlebar jarak antara Aceh dan Jakarta.

Alhasil, dinamika wacana Islam Aceh kembali berbalik menuju dimensi lebih global, namun dengan sudut pandang yang berbeda. GAM memanfaatkan pudarnya peran ulama yang berhasil dikooptasi oleh rezim Soeharto di akhir dekade 80-an (*Aspinal, 2007*). Ia berhasil mendekati kaum Islam setelah pemilu 1987 termasuk ulama Aceh dengan memberikan dana dan perhatian lebih besar pada pembangunan masjid, renovasi pesantren, dll. melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Meskipun terkesan simbolik, hal ini membuat ulama tidak lagi terlalu resisten terhadap Jakarta. Ujungnya, harmonisme ulama dan GAM terus merenggang. Ada kekhawatiran, yang kemudian dipolitisir oleh Pemerintah Indonesia, bahwa GAM memang sama sekali tidak memperjuangkan nilai keislaman di Aceh.

Di sisi lain, GAM lewat Deklarasi *Stavanger* (2002) menegaskan komitmennya pada *self-governance*, demokrasi, keadilan dan penegakan HAM di Aceh. Hal tersebut juga menurut GAM adalah esensi penting nilai-nilai Islam sebagai bentuk sipil dari realitas agama (*Kingsbury, 2007*), sehingga hadiah syariat Islam sebagai terjemahan keistimewaan dan otonomi khusus Aceh versi Jakarta ditolak GAM dan dituduh sebagai trik kebijakan politik salah kaprah. GAM berdalih bahwa syariat Islam tidak perlu diformalisasikan, karena Aceh memang sudah dari dulu sangat Islami.

Penerapan SI, selain ditolak keras GAM dan sejumlah LSM, di sisi lain juga didukung beberapa elemen mahasiswa dan organisasi keislaman. Hal ini menyebabkan legislasi dan qanun implementasi syariat yang memang bukan menjadi platform Partai Aceh (Partai politik lokal paska MoU Helsinki 2005 yang merupakan sayap politik mantan kombatan GAM) dan Gubernur menjadi ajang pertarungan legislasi yang dimotori oleh partai-partai Islam lokal dan nasional. Kedua kelompok ini menurut Salim, (2009) berusaha memperebutkan dan melebarkan pengaruh-kontrol sosial politik di Aceh via produk Qanun.

Kembali lagi, ketika GAM beralih dari wacana Islam ke wacana sekuler etno-nasionalis yang sedang menggejala. Pasca tragedi WTC (9/11/2001), Jakarta memainkan strategi kontra-wacana, yakni menghembuskan isu bahwa GAM adalah kelompok teroris (*Kassim, 2005*). Tuduhan ini menurut Dillon (2004) didasarkan pada

isu: GAM disinyalir punya kontak dengan kelompok Islam radikal Jemaah Islamiyah (JI) karena pernah mendapatkan pelatihan militer di Selatan Filipina (*Moro Islamic Liberation Front*, MILF); GAM dicurigai menyelundupkan senjata lewat bantuan kelompok *Pattani United Liberation Organization* (PULO) yang juga (disinyalir) dikategorikan sebagai teroris regional yang nomaden. Namun keberadaan ideologi GAM, Hasan Tiro, lewat interaksinya di pusat percaturan politik dunia, telah membantu menjelaskan mengapa pengaruh global berperan penting dalam kasus Aceh. Strategi retorik-propaganda, diaspora dan *exile* adalah efek interaksinya selama di luar negeri. Ia juga secara tegas membedakan karakter dan ideologi perjuangan GAM sebagai gerakan berasas demokrasi, liberalisme, dan nasionalisme. Satu hal yang sama sekali berbeda dengan DI-TII terdahulu yang menonjolkan unifikasi Islam di Aceh dan Indonesia.

Ternyata persinggungan antara wacana praktis Islam, nasionalisme dan globalisme tidak bisa dilepaskan dari sejarah Aceh. Pasang surut hubungan di antara ketiganya berujung pada tataran politik yang lebih me-lokal (*Aspinal, 2009*). Meskipun awalnya meng-global dengan pan-Islamisme di masa kesultanan, kemudian surut merespons kebutuhan lokal pada masa penjajahan kolonial, lalu merapat ke nasionalisme Indonesia paska kemerdekaan, mengecil lagi menjadi ketidakpuasan lokal, lalu bertemu dengan ide negara Islam Indonesia DI-TII, lalu membesar ke arah internasionalisme wacana global paska perang dingin dan akhirnya, tereduksi ke arah relasi politik lokal. Tentunya pasti ada persentuhan, dominasi, reduksi dan elaborasi diantaranya.

Hematnya, ini bukanlah kesimpulan akhir yang menyeluruh, selain hanya melihat salah satu dari sekian banyak perspektif batas waktu praktik diskursif Islam Aceh. Ini juga belum bisa menjelaskan arah perkembangan dominasi wacana Islam Aceh ke depan paska konflik. Harapannya adalah identitas Islam Aceh bisa mengambil segala makna positif dari unsur lokalisme, nasionalisme dan globalisme, sehingga niat untuk menjadi demokratis-humanis tidak terjegal oleh syariat Islam. Sebaliknya, demokrasi dan Islam Aceh mudah-mudahan bisa berevolusi menjadi demokrasi yang religius dan menjadi model bagi dunia.